

BAB II TINJAUAN TEORI

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark 1996). Kekayaan sumberdaya alam tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya, dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Secara normatif, kekayaan sumberdaya pesisir tersebut dikuasai oleh Negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945), serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir, sesuai dengan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 1997. Hal ini bahwa pemanfaatan sumberdaya saat ini harus tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang menunjukkan bahwa harus adanya pencegahan terhadap kerusakan yang sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang (<http://www.esdm.go.id>).

Sekitar 75 % dari luas wilayah nasional adalah berupa lautan. Salah satu bagian terpenting dari kondisi geografis Indonesia sebagai wilayah kepulauan adalah wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan wilayah interaksi/peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup besar serta jasa lingkungan lainnya. Kekayaan sumberdaya yang dimiliki wilayah tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan secara langsung atau untuk meregulasi pemanfaatannya karena secara sektoral memberikan sumbangan yang besar dalam kegiatan ekonomi, misalnya pertambangan, perikanan, kehutanan, industri, pariwisata dan lain-lain (<http://atanitokyo.blogspot.com/2009/01>).

Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terbesar di dunia, yang tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan berjenis-jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Selain wilayah

pesisir ini memiliki potensi sumberdaya alam yang antara lain meliputi pantai yang potensial untuk berbagai macam kegiatan seperti budidaya perikanan tradisional, pengolahan ikan (industri perikanan), serta kegiatan pariwisata pantai/bahari dengan keindahan alami, selain itu dapat pula menyimpan kekayaan sumberdaya hayati berupa ikan dan berbagai jenis hewan laut serta tumbuhan laut lainnya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk masa yang akan datang (*Bappenas, 2007*).

Sumberdaya perikanan memiliki keanekaragaman hayati perairan sangat potensial, baik dalam jenis maupun habitatnya. Keanekaragaman hayati yang hidup di laut memiliki ciri-ciri khusus. Biota yang hidup di perairan laut Paparan Sunda sebelah barat, laut dalam Selat Makasar, dan Paparan Sahul memiliki perbedaan. Ciri-ciri biota tersebut terkait dengan tipe topografi pada masing-masing kawasan, yang berevolusi sepanjang zaman. Berdasarkan perbedaan karakteristik kawasan laut, sumberdaya perikanan yang hidup di bagian barat, tengah, dan bagian timur perairan laut Indonesia juga berbeda. Di kawasan bagian barat banyak ditemukan muaramuara sungai besar dan puluhan sungai kecil yang mempengaruhi kesuburan perairan laut di Paparan Sunda. Sumberdaya perikanan yang paling menonjol di Paparan Sunda adalah berbagai jenis udang, kerang-kerangan, cumi-cumi, jenis-jenis kepiting, dan lain-lainnya. Sedangkan di kawasan laut dalam sekitar Sulawesi dan Maluku terdiri dari ikan cakalang, tuna, terbang, tongkol, tenggiri, layaran, cucut, layang, dan pari. Di kawasan Paparan Sahul, sumberdaya ikan yang penting adalah jenis-jenis kepiting, penyu, ikan bawal, kerapu, dan sebagainya.

Pada dasarnya kemajuan pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya tergantung pada kekayaan sumber daya alam saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh teknologi yang diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Dalam hubungan ini dikenal istilah industrialisasi pertanian (dalam hal ini industri dalam sektor perikanan) yang mengandung arti bahwa usaha pertanian itu diselenggarakan menurut teknologi maju, petani atau pengusaha menggunakan akal dan karyanya secara maksimal guna dapat mengendalikan dan memperbaiki semua faktor yang mempengaruhi proses produksi biologis hewan, memperbaiki pengolahan produksi tersebut menjadi komoditi yang lebih ekonomis dan lebih bermutu serta meningkatkan keterampilan untuk memasarkannya. Penggunaan teknologi maju

dalam rangka industrialisasi pada sektor perikanan tersebut umumnya merupakan penggunaan sarana produksi yang berupa alat-alat dan mesin-mesin produksi.

Dengan adanya industri perikanan, diharapkan dapat membantu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk di pedesaan di mana hampir 65% dari jumlah angkatan kerja tersebut hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau tidak berpendidikan sehingga produktivitasnya rendah serta sulit ditampung pada sektor kegiatan yang membutuhkan keahlian. Sehingga jenis industri ini telah diakui sebagai sarana penambahan kesempatan kerja bagi pemenuhan barang-barang konsumsi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan dengan adanya industri perikanan, maka berkembangnya kegiatan pengolahan akan dapat mendorong perluasan produksi sektor perikanan sebagai sektor yang berperan menyediakan bahan baku. Kondisi yang demikian itu akan menyebabkan meluasnya kesempatan kerja, baik di sektor perikanan sebagai penyedia bahan baku, sektor industri sebagai sektor pengolahan bahan baku maupun di sektor jasa akan terbentuk dengan adanya perluasan pada kegiatan ini.

2.1 Zona Pesisir Dan Sumberdaya Wilayah Pesisir

Pesisir merupakan perbatasan antara daratan dan lautan umumnya merupakan suatu garis yang tidak didefinisikan secara jelas pada sebuah peta, namun hal tersebut terjadi sebagai suatu wilayah transisi bertahap. Sebutan yang diberikan untuk wilayah transisi tersebut biasanya adalah “zona pesisir” atau “daerah pesisir”. Kawasan pesisir sampai saat ini masih sering diartikan suatu kawasan yang sempit dan sangat terbatas. Pesisir dinyatakan sebagai daerah unik karena disitulah daratan dan lautan bertemu dan tampak nyata, dan bagaimanapun hal tersebut memang merupakan suatu kenyataan yang penting.

Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu : batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Namun beberapa perbedaan mengenai batasan wilayah pesisir di semua Negara dapat diambil kesimpulan bahwa batas wilayah pesisir mencakup pada :

- Ke arah darat pada umumnya adalah jarak secara arbitrer dari rata-rata pasang tinggi (*mean high tide*), dan batas ke arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas yuridiksi provinsi yang bersangkutan.
- Untuk kepentingan pengelolaan, batas arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat ditetapkan dua macam, yaitu batas wilayah untuk perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day-to-day management*). Untuk wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan atau hulu, apabila terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata atau signifikan terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir. Jika suatu program pengelolaan wilayah pesisir menetapkan dua batasan wilayah pengelolaannya (wilayah perencanaan dan wilayah pengaturan), maka wilayah perencanaan selalu lebih luas daripada wilayah pengaturan. Dalam pengelolaan wilayah sehari-hari, pemerintah (pihak pengelola) memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan penolakan izin kegiatan pembangunan.
- Bahwa batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah, tergantung dengan isu pengelolaannya.

2.1.1 Definisi Karakteristik Zona Pesisir

Pesisir adalah tempat dimana daratan dan lautan bertemu. Bila garis pertemuan ini tidak bergerak/pindah, mendefinisikan pesisir menjadi hal yang mudah, hanya akan berarti suatu garis pada peta namun proses alami yang membentuk pesisir sangatlah dinamis, bervariasi baik dalam hal ruang maupun waktu. Jadi, garis yang menyatukan daratan dan lautan bergerak/pindah secara konstan, dengan pasang surut ombak, dan lewatnya badai, menciptakan suatu wilayah interaksi antara daratan dan lautan.

Terdapat dari bagian-bagian dari lingkungan pesisir yang jelas-jelas memiliki interaksi yang kuat antara daratan dan lautan, termasuk pesisir, rawa-rawa, bakau dan batu-batu karang; bagian-bagian lain mungkin lebih jauh dari pesisir (pedalaman atau laut bebas), namun begitu bagian-bagian tersebut memainkan peranan yang penting

dalam membentuk pesisir. Salah satu yang terpenting diantaranya adalah sungai-sungai yang merupakan air tawar dan endapan untuk lingkungan pesisir. Dalam hal ini, batas pedalaman dengan pesisir merupakan batas-batas penangkapan yang mungkin jaraknya beribu-ribu kilometer ke arah pedalaman pada bagain depan dari daerah penangkapan.

Karenanya, pesisir mungkin dianggap sebagai daerah yang memperlihatkan suatu hubungan antara daratan dan lautan, dan suatu daerah pesisir didefinisikan (Ketchum, 1972) sebagai tanda dari daratan kering dan ruang lautan yang berbatasan dengannya (perairan dan daratan yang sebagian tenggelam), dimana proses-proses teresterial dan penggunaan-penggunaan daratan secara langsung mempengaruhi proses-proses dan pemanfaatan kelautan dan teresterial; daerah pesisir terdiri dari daratan yang berinteraksi dengan lautan, dan ruang lautan yang berinteraksi dengan daratan. Jadi daerah pesisir merupakan :

- Terdiri dari komponen daratan dan komponen lautan.
- Memiliki batas-batas daratan dan lautan yang ditentukan oleh tingkat pengaruh dari daratan terhadap lautan dan lautan terhadap daratan.
- Tidak seragam dalam hal kelebaran, kedalaman atau ketinggian.

Tiga faktor yang memperlihatkan, untuk pesisir berpasir, kekuatan dari interaksi antara proses-proses dan pemanfaatan-pemanfaatan pesisir dan laut, yang disini disebut sebagai “tingkat kepesisiran”, terdapat jarak dari pesisir, dapat juga diterapkan pada lingkungan-lingkungan pesisir lainnya, seperti delta, sistem pesisir/rintangan dan pesisir muara, dimana berbagai proses fisik dan biologi dari lingkungan tersebut akan menentukan “tingkat kepesisirannya”. Misalnya, pada pesisir delta, faktor-faktor penentu yang penting akan merupakan tingkat penetrasi air asin ke permukaan air tawar dan sistem air tanah, serta jarak ke arah laut menuju endapan teresterial.

2.1.2 Komponen Wilayah Pesisir

Seperti halnya wilayah pesisir lain dalam permukaan bumi, wilayah pesisir memiliki aspek keruangan. Wilayah pesisir terjadi karena mekanisme yang bekerja dalam batas bentang alam tertentu, yaitu : proses geomorfologis yang terjadi dalam

rentang waktu yang sangat lama, pola kolonisasi organisme, serta perubahan yang sifatnya lokal dalam rentang waktu yang relatif pendek, baik alami maupun gangguan aktivitas manusia. Wilayah pesisir dengan demikian adalah suatu bentang alam yang *distinct*, suatu unit terukur yang ditentukan oleh kelompok ekosistem yang saling berinteraksi dimana kelompok ini berulang, baik dalam skala temporal, proses geomorfologi yang berulang, serta regim perubahannya (Forman and Gordon, 1986).

Dengan demikian, komponen sistem wilayah pesisir dapat ditelaah dari segi :

- a. Struktur hubungan keruangan antara ekosistem yang *distinct* atau elemen-elemen yang ada. Lebih spesifik, struktur keruangan dilihat dari distribusi energi, materi, serta spesies yang berkaitan dengan besar, bentuk, jumlah, jenis, serta konfigurasi dari ekosistem tersebut.
- b. Fungsi : interaksi antara elemen spasial yang berkaitan dengan aliran energi, material, spesies, serta proses yang dipicu oleh kegiatan manusia dalam elemen ekosistem tersebut.
- c. Perubahan : aksi yang menyebabkan perubahan struktur dan fungsi ekologis sejalan dengan waktu.

2.1.3 Sumberdaya Wilayah Pesisir

Secara umum, banyak potensi yang terdapat di pesisir dan kelautan yang memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Dikatakan spesifik, karena memiliki keanekaragaman biota laut (ikan dan vegetasi laut) dan potensi lainnya seperti kandungan bahan mineral. Sumberdaya pesisir dan kelautan dapat dibedakan secara biotik dan abiotik.

❖ Sumberdaya Biotik

Sumberdaya biotik merupakan sumberdaya yang bersifat biologis atau merupakan makhluk hidup. Secara biotik, sumberdaya pesisir dan kelautan adalah :

A. Ikan dan Hewan Laut Lainnya

Dalam definisi Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dikatakan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebahagian hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Sumberdaya perikanan, merupakan hasil kekayaan laut yang memiliki potensi besar untuk menambah devisa Negara. Selain

ikan, hewan laut lainnya banyak yang dapat dimanfaatkan terutama untuk dikonsumsi, seperti kerang, cumi-cumi, lobster, dan lainnya.

Untuk setiap karakteristik wilayah pesisir memiliki sumberdaya ikan yang berbeda-beda. Sumberdaya ikan dan hewan laut lainnya banyak berada pada zona neritik atau laut dangkal dimana kondisi di zona tersebut sangat mendukung bagi kehidupan ikan dan hewan lautnya seperti ketersediaan cahaya matahari, kekuatan arus, dan keberagaman vegetasi yang hidup sebagai suatu kesatuan ekosistem. (Raharjo Adisasmita, 2006).

B. Tumbuhan Laut

▪ Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrient bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi bermacam biota, penahan abrasi, penahan amukan angin taufan, dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis seperti penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, dan lain-lain. Ekosistem bakau banyak terdapat di bagian-bagaian pulau-pulau yang terlindung dan menyebar hampir disetiap kelompok pulau, seperti Karimun, Batam, Bintan, Siantan, Tambelan, Singkep/Selayar. Jenis hutan bakau yang umumnya ditemukan antara lain : *Rhizophora*, *Soneratia* dan *Avicenia*.

Pengertian mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas tersebut di daerah pasang surut. Hutan mangroove adalah tipe hutan yang secara alami dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tergenang pada saat pasang naik dan bebas dari genangan pada saat pasang rendah. Ekosistem mangroove adalah suatu sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu habitat mangroove.

▪ Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem subur yang terdapat di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Ekosistem ini di bentuk oleh komunitas karang dan berbagai biota laut yang berasosiasi dengan karang. Dalam hal evaluasi terhadap

kondisi ekosistem terumbu karang, kriteria yang dikembangkan berupa tutupan karang.

Ekosistem terumbu karang dikatakan buruk apabila mempunyai karang hidup sebesar 0-24,9 %, sedang apabila tutupan karang hidup 25-49,9 %, dikatakan bagus apabila tutupan karang hidup 50-74,9 % dan dikatakan sangat bagus apabila mempunyai tutupan karang hidup > 75 % (Raharjo Adisasmita, 2006).

- Rumput Laut dan Lamun (Seagrass)

Perairan dangkal di beberapa pulau di Indonesia mempunyai beberapa jenis rumput laut dan lamun. Tumbuhan laut yang terdiri dari kelompok lamun dan rumput laut hampir menyebar di seluruh kelompok pulau dan berasosiasi dengan ekosistem hutan bakau dan terumbu karang. Jenis-jenis lamun yang dijumpai di Kepulauan Riau antara lain : *Cymodocea rotundata*, *C. serrulata*, *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Holodule pinnifolia*, *H. uninervis*, *Holophila ovalis*, *Syringodium isoetifolium* dan *Thalassodendrum ciliatum*. Sedangkan jenis rumput laut yang banyak ditemukan di rataan terumbu karang maupun lamun antara lain kelompok algae merah (*Gelidiella*, *Hypnea*, *Gracilaria*, *Neoginiolithon*, *Lithothamnion*, *Dictyota*, *Laurencia*, *Fauche*), kelompok alga hijau (*Caulerpa*, *Halimeda*, *Cahemorpha*, *Udoea*, *Chlorodermis*, *Valonia*, *Ulva*) dan kelompok alga coklat (*Sargassum*, *Padina*, *Turbinaria*).

- ❖ **Sumberdaya Abiotik**

- A. Air Laut**

Air laut mengandung 3,5 % garam-garam, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut. Keberadaan garam-garaman mempengaruhi sifat fisis air laut (seperti: densitas, kompresibilitas, titik beku, dan temperatur dimana densitas menjadi maksimum) beberapa tingkat, tetapi tidak menentukannya. Beberapa sifat (viskositas, daya serap cahaya) tidak terpengaruh secara signifikan oleh salinitas. Dua sifat yang sangat ditentukan oleh jumlah garam di laut (salinitas) adalah daya hantar listrik (konduktivitas) dan tekanan osmosis.

Garam-garaman utama yang terdapat dalam air laut adalah klorida (55 %), natrium (31 %), sulfat (8 %), magnesium (4 %), kalsium (1 %), potassium (1 %) dan sisanya (kurang dari 1 %) terdiri dari bikarbonat, bromide, asam borak, strontium dan

florida. Tiga sumber utama garam-garaman di laut adalah pelapukan batuan di darat, gas-gas vulkanik dan sirkulasi lubang-lubang hidrotermal (*Hydrothermal vents*) di laut dalam. Secara ideal, salinitas merupakan jumlah dari seluruh garam-garaman dalam gram pada setiap kilogram air laut, oleh karena itu penentuan harga salinitas dilakukan dengan meninjau komponen yang terpenting saja yaitu klorida (Cl). Kandungan klorida pada satu kilogram air laut jika semua halogen digantikan oleh klorida. Penetapan ini mencerminkan proses kimiawi titrasi untuk menentukan kandungan klorida.

B. Angin Laut

Angin ini terjadi di daerah pantai yang diakibatkan adanya perbedaan sifat daratan dan lautan. Pada malam hari daratan lebih dingin daripada lautan sehingga di daratan merupakan daerah maksimum yang menyebabkan terjadinya angin darat. Sebaliknya, pada siang hari terjadi angin laut.

C. Gelombang Laut

Gelombang selalu menimbulkan sebuah ayunan air yang bergerak tanpa henti-hentinya pada permukaan air laut dan jarang dalam sama sekali diam. Secara teori, pengertian gelombang laut (ideal) adalah pergerakan naik turunnya muka air laut yang membentuk lembah dan bukit mengikuti gerak sinusoidal.

Penyebab terjadi gelombang laut dipengaruhi beberapa faktor berikut :

1. Kecepatan angin,
2. Lama anginnya bertiup dan luas daerah yang terkena pengaruh,
3. Kedalaman air laut,
4. Adanya getaran kulit bumi di dasar laut,
5. Tetapi faktor utamanya karena angin dan gempa.

D. Minyak Laut

Sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan bermotor dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme, sehingga disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan dan hewan yang mati sekitar 150 juta tahun yang lampau. Sisa-sisa organism itu mengendap di dasar lautan yang kemudian ditutupi oleh lumpur. Lapisan lumpur

tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh suhu dan tekanan lapisan di atasnya. Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik itu dan mengubahnya menjadi minyak dan gas. Proses pembentukan minyak dan gas ini memakan waktu jutaan tahun. Minyak dan gas yang terbentuk meresap dalam batuan yang berpori bagaikan air dalam batu karang. Minyak dan gas dapat pula bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain, kemudian terkonsentrasi jika terhalang oleh lapisan yang kedap. Walaupun minyak bumi dan gas alam terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas yang terdapat di daratan. Hal ini terjadi karena pergerakan kulit bumi, sehingga sebagian lautan menjadi daratan.

2.2 Pembangunan Perikanan

Kegiatan menangkap ikan dan membudidaya ikan telah berlangsung ribuan, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Dengan demikian kegiatan perikanan merupakan proses pembelajaran kolektif dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut. Oleh karenanya dalam memahami konsep perikanan, berbagai perspektif ini harus dikaji terlebih dahulu sehingga kita tidak terpaku pada pengertian sesaat yang mungkin berlaku pada konteks ruang dan waktu yang berbeda.

2.2.1 Definisi Perikanan

Sebagaimana telah kita bahas di atas, perikanan memegang peranan sangat penting dalam peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Lalu apa sebenarnya perikanan itu sendiri. Istilah perikanan atau fishery memang bisa membingungkan karena banyaknya definisi yang digunakan baik secara teknis maupun nonteknis. Untuk itu terlebih dahulu harus kita pahami bersama apa itu perikanan sehingga kita memiliki persepsi yang sama mengenai hal itu.

Secara umum, Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan, industri atau pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Definisi yang hampir serupa juga ditemukan di Encyclopedia Britannica yang mendefinisikan perikanan sebagai pemanenan ikan, kerang-kerangan (*shellfish*) dan mamalia laut. Sementara Hempel dan Pauly (2004) mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan

eksploitasi sumberdaya hayati dari laut (Hempel dan Pauly, 2004). Definisi di atas memang membatasi pada perikanan laut karena perikanan memang semula berasal dari kegiatan *hunting* (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan *farming* seperti budidaya. Dalam artian yang lebih luas, perikanan tidak saja diartikan aktivitas menangkap ikan (termasuk hewan invertebrata lainnya seperti *finfish* atau ikan bersirip) namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerang-kerangan, rumput laut dan sumberdaya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu.

Definisi yang lebih luas diberikan oleh Lackey (2005) yang mengartikan perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yakni biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai pengguna sumberdaya tersebut. Setiap komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan. Lackey (2005) kemudian membagi perikanan ke dalam berbagai kelompok atau tipe berdasarkan beberapa sifat antara lain :

1. Jenis lingkungan : contoh, perikanan air tawar, danau, laut, sungai, bendungan.
2. Metode permanen : contoh, perikanan trawl, purse seine, dipnet, dan sebagainya.
3. Jenis akses yang diizinkan : contoh, perikanan akses terbuka (*open access*), perikanan *open access* dengan regulasi, perikanan dengan akses terbatas.
4. *Concern organism*, contoh, perikanan salmon, udang, tuna, kepiting.
5. Berdasarkan tujuan penangkapan : perikanan komersial, sub-sisten, perikanan rekreasi.

Dalam konteks bahasan perikanan sehari-hari tatanan praktis maupun ilmiah, definisi Lackey barangkali yang lebih umum digunakan karena cakupan yang lebih luas daripada definisi yang lain. Lebih jauh Lackey (2005) memperkirakan bahwa saat ini kegiatan perikanan telah melibatkan lebih dari 4000 spesies hewan perairan dengan dominasi jenis-jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, udang, salmon, cod, dan crabs (khususnya di perairan Alaska).

Definisi diatas tentu saja sebatas definisi ilmiah yang berlaku secara umum. Dalam konteks legal, Indonesia mengartikan perikanan melalui pengertian yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan. Undang-undang No. 31 Tahun 2004

tentang perikanan yang diubah dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 mendefinisikan perikanan sebagai :

“semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan...” (UU 31 No. Tahun 2004 *Bab 1 pasal 1 ayat 1*).

Untuk memahami lebih jauh konsep mengenai perikanan, Copes (1992) mengenalkan konsep perikanan berdasarkan beberapa kategori pemanfaatan sumberdaya hayati perairan sebagaimana terlihat pada **Tabel II.1**.

Tabel II.1
Matriks Pemanfaatan Sumberdaya Perairan

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Proses Eksploitasi | Hunting (Berburu) | Gathering (Mengumpulkan) | Husbandry (farming) |
| Mobilitas Sumberdaya | Fugitive (Bergerak) | Sedentary (Menetap) | Contained (Dikendalikan) |
| Struktur Hak Kepemilikan | Common Property | | Privat Property |
| Klasifikasi Sektor | Fishing | | Aquaculture |

Sumber : Akhmad Fauzi, 2010 : 18

2.2.2 Karakteristik Perikanan

Sebagaimana diuraikan di atas, perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan *farming* berdasarkan beberapa tipologi sebagaimana diuraikan oleh Copes tersebut. Namun demikian karakteristik tersebut tidak terbatas pada mobilitas dan proses eksploitasi saja. Struktur kepemilikan misalnya bisa dielaborasi lebih jauh. Ekstarki sumberdaya ikan berlangsung berdasarkan doktrin *res nullius* yang dalam bahasa latin berarti objek yang semestinya bisa dimiliki namun tidak bisa dimiliki oleh individu. Berdasarkan kaidah inilah kemudian pemilikan menjadi *common property*. Dengan kata lain perikanan bisa diartikan sebagai pengambilan objek *res nullius*. Slogan yang sering diucapkan adalah “*everybody’s property is nobody’s property*”. Kaidah umum ini sudah lama disepakati bersama karena ikan di laut atau

di sungai atau media lain yang tidak menjadi subjek kepemilikan seseorang menjadi objek yang disebut sebagai *ferae naturae*. *Ferae Naturae* adalah kondisi dimana hewan atau ikan memiliki sifat asal alamiah (*wild by nature*), tidak ada yang berhak mengklaim kepemilikannya dan kepemilikan hanya berlaku ketika seseorang menangkapnya. Dengan kata lain ikan menjadi milik seseorang ketika ikan tersebut telah ditangkap. Dalam konteks ekonomi perikanan sumberdaya diistilahkan sebagai *capture resource* atau sumberdaya tangkap. Oleh karena sifat dari *ferae naturae* inilah perikanan mengalami gejala apa yang disebut sebagai *market failure* atau kegagalan pasar. Bahkan dalam kasus perikanan *market failure* ini lebih merupakan “hukum” ketimbang “pengecualian” *market failure is the rule, rather than the exception*). Kegagalan pasar ini merupakan karakteristik yang khas (*distinctive feature*) dalam perikanan.

Dalam konteks sumberdaya dengan kepemilikan jelas, maka produsen akan memanfaatkan seluruh sumberdaya input seefisien mungkin untuk menghasilkan output dengan biaya yang paling minimum. Selain itu, kepemilikan yang jelas juga memungkinkan timbulnya hak untuk mencegah pihak lain (*right to exclude*) untuk mengambil sumberdaya tersebut. Dalam kasus perikanan, karena sifat *ferae naturae* maka siapa saja yang memiliki alat dapat menangkap ikan dan tanpa hak pemilikan yang bisa mencegah nelayan lain untuk berpartisipasi dalam menangkap ikan sebanyak-banyaknya agar tidak dihabiskan oleh pihak lain. Dengan kata lain “pasar” tidak memberikan sinyal kepada produsen atau nelayan terhadap dampak negatif atau eksternalitas negatif yang ditimbulkan akibat penangkapan ikan yang berlebihan.

Eksternalitas diartikan sebagai dampak yang ditimbulkan terhadap satu pihak oleh tindakan atau keputusan pihak lain tanpa pihak yang terkena dampak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam perikanan, eksternalitas negatif yang ditimbulkan akibat kegagalan pasar ini bisa berbagai macam.

Karakteristik lain yang juga merupakan karakteristik unik dari perikanan adalah apa yang disebut sebagai *biological feedback* (umpan balik biologi). Dalam perikanan merupakan input dan juga output dalam proses produksi. Sumberdaya ikan sangat reaktif terhadap eksploitasi dan kondisi alam yang menyediakan ikan akan

menentukan berapa ikan bisa diekstraksi. Jadi ketersediaan stok ikan (input) akan menentukan berapa ikan bisa ditangkap (output).

2.2.3 Struktur Komponen Perikanan

Selain dari karakteristik yang telah dibahas diatas, sektor perikanan juga memiliki struktur komponen yang terdiri dari tiga komponen utama yakni; basis sumberdaya (*resource base*), industri perikanan primer dan industri pengolahan dan perdagangan. Struktur ini kemudian bisa lebih rinci lagi dibagi dalam beberapa kategori seperti tertera pada **Gambar 2.1**.

Komponen basis sumberdaya (*resource base*) pada hakikatnya adalah kegiatan perikanan yang didasarkan pada jenis sumberdaya ikan apakah berbasis *finfish* (ikan) atau *nonfinfish* (non ikan) seperti crustacean (udang-udangan), kerang-kerangan (Chepalopods), dan sebagainya. Di Negara-negara maju perikanan seperti ini merupakan jenis industri tersendiri sehingga mereka memiliki izin khusus (lisensi) yang dikhususkan untuk memanen jenis-jenis sumberdaya ikan diatas.

Komponen kedua adalah menyangkut industri primer yakni kegiatan perikanan yang menyangkut pemanenan langsung sumberdaya ikan. Komponen ini bisa dikategorikan dalam bentuk skala atau tipe industri yakni skala subsisten yakni pemanenan yang hanya didasarkan pada kebutuhan pemenuhan konsumsi bukan untuk tujuan komersial. Kategori yang kedua adalah menyangkut skala ekonomi tradisional atau skala kecil. Industri ini biasanya dicirikan oleh penggunaan alat yang sederhana seperti kapal tanpa motor, alat tangkap yang sederhana, dan jarak tangkap yang terbatas serta rantai pemasaran yang terbatas. Kategori lain adalah perikanan tipe rekreasi yang berbasis pada *leisure* atau kesenangan. Kategori ini juga sering disebut sebagai *sport fishing* dimana hasil tangkapan tidak untuk dijual namun lebih kepada kesenangan (*enjoyment*).

Di Negara-negara maju hasil tangkapan dari perikanan rekreasi ini secara hukum harus dilepaskan kembali ke habitatnya. Kategori yang lebih kita kenal dalam konteks pengembangan ekonomi adalah perikanan industri atau komersial. Tipe perikanan ini dicirikan oleh penggunaan alat tangkap yang lebih modern seperti

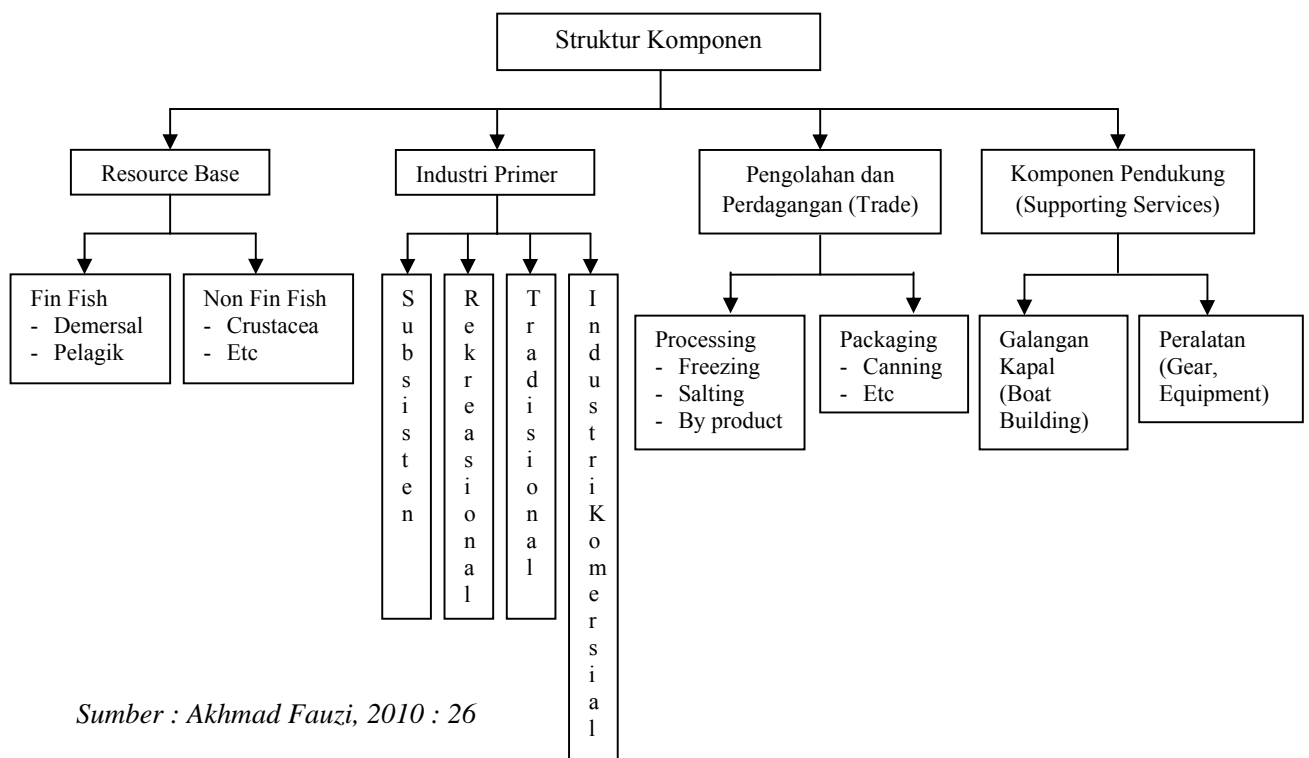
penggunaan motor, jarak tempuh yang lebih jauh dan skala pemasaran yang lebih luas.

Struktur komponen ketiga adalah yang menyangkut aspek pengolahan dan perdagangan (*trade*). Komponen ini muncul karena adanya tiga sebab utama dalam industri perikanan yakni :

1. Jika hasil tangkapan harus disimpan dalam waktu yang relatif lama.
2. Jika hasil tangkap harus dibawa dari lokasi penangkapan ke pasar dalam jarak tempuh yang relatif jauh.
3. Jika hasil tangkap diperuntukkan untuk tujuan ekspor.

Ketiga unsur diatas melibatkan aktivitas pemrosesan (*processing*) seperti pembekuan, pemindangan, penggaraman dan sebagainya serta pengemasan (*packaging*) seperti pengalengan yang cukup bervariasi derajat kompleksitas dari yang sederhana sampai yang *sophisticated* (canggih). Komponen perikanan juga harus di tunjang oleh komponen pendukung yakni galangan kapal dan komponen pendukung peralatan perikanan.

Gambar 2.1
Klasifikasi Struktur Komponen Perikanan



Sumber : Akhmad Fauzi, 2010 : 26

2.2.4 Tujuan Pembangunan Perikanan

Sumberdaya perikanan merupakan aset alam yang diekstraksi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia. Namun demikian aspek manfaat ini memiliki berbagai dimensi, baik dimensi ekonomi, ekologi maupun sosial. Kompleksitas sumberdaya ikan ini menyebabkan tujuan pembangunan perikanan juga semakin kompleks. UU No. 31 Tahun 2004 dan UU No. 45 Tahun 2009 mengenai perikanan, misalnya menyatakan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan “untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan” (Bab IV, pasal 6 ayat 1, UU No. 31 Tahun 2004). Berdasarkan kriteria tersebut tentu tidak mudah untuk mencapai pengelolaan sebagaimana dimaksud.

Secara analitis dan empiris tujuan pembangunan perikanan dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori tujuan yakni kategori ekonomi, sosial, dan eko-teknologi. Di dalam masing-masing kategori ada beberapa subkategori seperti peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, konservasi sumberdaya ikan dan sebagainya. Setiap tujuan tersebut jika dilihat dari aspek pengelolaan yakni aspek keberlanjutan, efisiensi dan *equity* (kesetaraan) maka tentu saja sulit untuk memenuhi seluruh aspek tersebut.

2.2.5 Industri Perikanan

Industri adalah bidang mata pencaharian yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik (<http://www.wikipedia.com>).

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi

adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa (<http://www.organisasi.org>).

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (<http://www.wikipedia.com>).

Industri perikanan meliputi setiap industri atau kegiatan yang bersangkutan dengan mengambil, budidaya, pengolahan, pengawetan, penyimpanan, pengangkutan, pemasaran atau menjual produk ikan atau ikan.

Hal ini didefinisikan oleh FAO sebagai termasuk rekreasi, subsisten dan nelayan komersial, dan pemanenan, pengolahan, dan sektor pemasaran. Kegiatan komersial ditujukan untuk pengiriman ikan dan produk makanan laut lainnya untuk konsumsi manusia atau sebagai faktor input dalam proses industri lainnya. Langsung atau tidak langsung, mata pencaharian lebih dari 500 juta orang di negara-negara berkembang tergantung pada perikanan dan budidaya.

Ada tiga sektor industri utama :

- Sektor komersial : terdiri dari perusahaan dan individu yang terkait dengan menangkap atau sumber daya perikanan budidaya dan berbagai transformasi sumber daya menjadi produk untuk dijual. Hal ini juga disebut sebagai "industri makanan laut", walaupun barang non-makanan seperti mutiara yang termasuk di antara produk-produknya.
- Sektor tradisional : terdiri dari perusahaan dan individu yang terkait dengan sumber daya perikanan, produk yang dihasilkan sesuai dengan tradisi mereka (orang-orang asli pribumi).
- Sektor rekreasi : terdiri dari perusahaan dan individu yang terkait untuk tujuan rekreasi, olahraga atau rezeki dengan sumber daya perikanan, dan produk yang berasal tidak untuk dijual.

❖ **Sektor Komersial**

Sektor komersial industri perikanan terdiri dari rantai berikut :

1. Komersial nelayan dan petani ikan yang menghasilkan ikan.

2. Pengolahan ikan yang memproduksi produk-produk ikan.
3. Pemasaran produk ikan.

A. Penangkapan Ikan

Negara-negara penghasil adalah: Republik Rakyat Cina (termasuk Hong Kong dan Taiwan), Peru, Jepang, Amerika Serikat, Chile, Indonesia, Rusia, India, Thailand, Norwegia dan Islandia. Negara-negara menyumbang lebih dari setengah dari produksi dunia, Cina sendiri menyumbang sepertiga dari produksi dunia.

B. Budidaya Ikan

Akuakultur adalah budidaya organisme perairan. Tidak seperti penangkapan ikan, budidaya, juga dikenal sebagai budidaya perikanan, adalah budidaya populasi air dalam kondisi yang terkendali. Budidaya mengacu pada akuakultur dipraktekkan dalam lingkungan laut. Jenis khusus dari akuakultur termasuk algaculture (produksi rumput laut/ganggang rumput laut dan lainnya); budidaya ikan, budidaya udang, budidaya kerang, dan pertumbuhan budidaya mutiara.

Ikan pertanian melibatkan budidaya ikan komersial pada tangki atau kolam tertutup, biasanya untuk makanan. Jenis ikan yang diangkat oleh tambak ikan termasuk ikan mas, ikan salmon, nila, lele dan cod. Peningkatan permintaan pada perikanan liar dari operasi penangkapan ikan komersial telah menyebabkan overfishing luas. Pertanian Ikan menawarkan solusi alternatif untuk permintaan pasar meningkat untuk protein ikan dan ikan.

C. Pengolahan Ikan

Pengolahan ikan adalah pengolahan ikan disampaikan oleh perikanan komersial dan peternakan ikan. Perusahaan-perusahaan pengolahan ikan yang lebih besar memiliki armada penangkapan ikan mereka sendiri dan perikanan independen. Produk industri biasanya dijual ke rantai toko grosir atau perantara.

Pengolahan ikan dapat dibagi menjadi dua kategori: penanganan ikan (pengolahan awal ikan mentah) dan produk ikan manufaktur. Aspek pengolahan ikan terjadi pada kapal penangkap ikan, kapal pengolahan ikan, dan di pabrik pengolahan ikan.

Dalam subdivisi alam adalah menjadi pengolahan utama yang terlibat dalam filleting dan pembekuan ikan segar untuk distribusi lanjutan ke ritel ikan segar dan outlet catering, dan pengolahan sekunder yang menghasilkan produk dingin, beku dan kaleng untuk perdagangan ritel dan catering.

D. Produk Ikan

Perikanan diperkirakan saat ini menyediakan 16% protein penduduk dunia. Daging ikan banyak yang terutama dinilai sebagai sumber makanan, ada banyak spesies ikan dapat dimakan. Kehidupan laut lainnya yang diambil sebagai makanan termasuk kerang, udang, teripang, ubur-ubur dan roe.

Ikan dan biota laut lainnya juga digunakan untuk banyak kegunaan lain: mutiara, kulit ikan hiu. Kuda laut, bintang ikan, bulu babi dan teripang digunakan dalam pengobatan tradisional Cina. Tyrian ungu merupakan pigmen yang terbuat dari siput laut, sepia merupakan pigmen yang dibuat dari cairan tinta pada cumi-cumi. Lem ikan telah lama bernilai untuk digunakan dalam segala macam produk. Isinglass digunakan untuk klarifikasi anggur dan bir. Emulsi ikan merupakan emulsi pupuk yang dihasilkan dari cairan sisa-sisa ikan olahan untuk minyak ikan dan tepung ikan.

Dalam industri produk makanan laut istilah ini sering digunakan sebagai pengganti produk ikan.

E. Pemasaran Ikan

Pasar Ikan pasar digunakan untuk perdagangan dan penjualan ikan dan seafood lainnya. Mereka dapat didedikasikan untuk perdagangan grosir antara nelayan dan pedagang ikan, atau dengan penjualan makanan laut kepada konsumen individu, atau untuk keduanya. Pasar ikan Ritel, sejenis pasar basah, sering menjual makanan jalan juga.

Kebanyakan udang beku dijual dan dipasarkan dalam kategori yang berbeda. Perdagangan pakan hidup ikan adalah sistem global yang menghubungkan masyarakat nelayan dengan pasar.

❖ Sektor Tradisional

Industri perikanan tradisional, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan komersial skala kecil atau praktek subsistensi penangkapan ikan,

terutama menggunakan teknik tradisional seperti panah dan tombak, melempar jala dan jaring seret, dan lain-lain. Biasanya tidak menutup konsep memancing untuk olahraga, dan dapat digunakan ketika berbicara tentang tekanan antara skala besar praktek penangkapan ikan yang modern komersial dan metode tradisional, atau ketika program-program bantuan yang ditargetkan khusus untuk memancing di atau dekat tingkat subsistensi.

❖ **Sektor Rekreasi**

Industri perikanan rekreasi terdiri dari perusahaan seperti pembuatan dan perdagangan eceran memancing dan pakaian jadi, pembayaran biaya lisensi untuk badan pengawas, memancing buku dan majalah, desain dan bangunan kapal perikanan rekreasi, dan penyediaan akomodasi, perahu nelayan untuk charter, dan petualangan memancing yang dipandu.

2.3 Pengembangan Wilayah

2.3.1 Konsep Wilayah Dan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah :

1. Sebagai growth center, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (spread effect) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.

2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.
4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

2.3.2 Pembangunan Berkelanjutan

Definisi konsep pembangunan berkelanjutan diinterpretasikan oleh beberapa ahli secara berbeda-beda. Namun demikian pembangunan berkelanjutan sebenarnya didasarkan kepada kenyataan bahwa kebutuhan manusia terus meningkat. Kondisi yang demikian ini membutuhkan suatu strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien. Disamping itu perhatian dari konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya tanggungjawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana memperlakukan alam dengan kapasitas yang terbatas namun akan tetap dapat mengalokasikan sumberdaya secara adil sepanjang waktu dan antar generasi untuk menjamin kesejahteraannya.

Penyusutan yang terjadi akibat pemanfaatan masa kini hendaknya disertai suatu bentuk usaha mengkompensasi yang dapat dilakukan dengan menggali kemampuan untuk mensubstitusi semaksimal mungkin sumberdaya yang langka dan terbatas tersebut sehingga pemanfaatan sumberdaya alam pada saat ini tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang (intergenerational equity).

Definisi Pembangunan berkelanjutan menurut Bond et al. (2001) pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dimana pembangunan ekonomi, sosial dan proteksi lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan. Bosshard (2000) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan

sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan lima prinsip kriteria yaitu: (1) abiotik lingkungan, (2) biotik lingkungan, (3) nilai-nilai budaya, (4) sosiologi, dan (5) ekonomi. Marten (2001) mendefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kecukupan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak berarti berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, karena tidak mungkin ekonomi tumbuh jika ia tergantung pada keterbatasan kapasitas sumberdaya alam yang ada.

Selain itu ada pula beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan, antara lain (Abdurrahman, 2003) :

1. Emil Salim

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (Yayasan SPES, 1992 :3).

Ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berkelanjutan ini, yaitu :

- a. Proses pembangunan ini mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut.
- b. Sumber alam terutama udara, air, dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan ini berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berkelanjutan, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia.
- c. Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya.

- d. Pembangunan berkelanjutan memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2. Ignas Kleden

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang disatu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumberdaya manusia secara optimal, dan dilain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumberdaya tersebut (yayasan SPES, 1992 : XV).

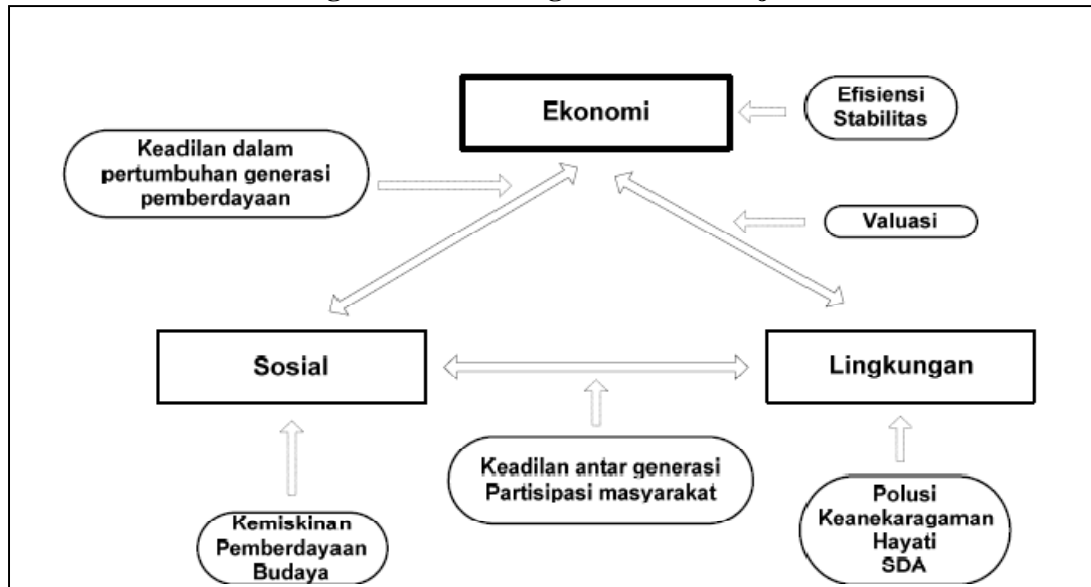
3. Sofyan Effendi

- a. Pembanguna berkelanjutan adalah pembangunan yang pemanfaatan sumberdayanya, arah invesinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaanya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingannya.

Konsep pembangunan yang berkesinambungan memang mengimplikasikan batas, bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat teknologi dan organisasi sosial sekarang ini mengenai sumberdaya lingkungan serta oleh kemampuan biosfer menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia, akan tetapi teknologi untuk memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi.

Dalam definisi diatas dapat dipahami bahwa konsep pembangunan berkelanjutan didirikan atau didukung oleh 3 pilar, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pendekatan tersebut bukanlah pendekatan yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Secara skematis, keterkaitan antar 3 komponen dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut (Munasinghe-Cruz, 1995).

Gambar 2.2
Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : Askary (2003)

2.3.3 Konsep Minapolitan

Program Minapolitan merupakan program rumpun Agropolitan yang secara fungsional bertumpu pada kegiatan sektor perikanan dengan basis pengembangan komoditas unggulan baik pada kegiatan budidaya laut, air payau maupun air tawar, termasuk produk-produk olahan dan jasa lingkungan perairan dalam suatu *cluster* kawasan yang terdiri dari beberapa desa atau kecamatan, sebagai upaya mewujudkan kesejajaran antara kota dengan desa. Dalam kondisi kesejajaran itulah, diharapkan akan terjadi peningkatan akses masyarakat pedesaan melalui pengembangan pusat-pusat pelayanan. Karena itu, pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi kunci penting sebagai awal pembangunan Minapolitan

Dalam konteks pembangunan nasional, pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan bentuk penjabaran dan implementasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya di dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan kawasan pedesaan yang bertumpu pada pembangunan agribisnis dalam arti luas serta terkoordinasikan dalam sistem pembangunan wilayah secara terpadu dan berkesinambungan.

Oleh sebab itu pengembangan Minapolitan seyogyanya diawali oleh adanya *base line study* untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Master Plan Kawasan dan jenis komoditas andalan yang akan dikembangkan dengan berbagai persyaratan, baik teknis maupun sosial untuk kemudian dapat digunakan sebagai indikator dalam evaluasi kinerja Minapolitan. Selain itu agar program Minapolitan dapat menjadi gerakan yang sistemik, dibutuhkan pula antara lain: komunikasi politik dengan pihak legislatif dalam proses perencanaan anggaran untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam implementasinya; peningkatan pemahaman program Minapolitan kepada stakeholder daerah; pengembangan kegiatannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan sinergitas lintas kawasan dalam perspektif regional (provinsi). Selanjutnya variabel-variabel lain yang turut menjadi kunci keberhasilan pembangunan Minapolitan adalah: dukungan tokoh-tokoh masyarakat dalam kawasan, pokja agropolitan yang solid, dan pimpinan daerah yang memiliki komitmen yang tinggi sebagai pijakan lintas sektor dan lintas hirarki pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, guna mendukung pendekatan Minapolitan yang mantap dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat secara nasional, diperlukan adanya rumusan yang lebih komprehensif mengenai konsep Minapolitan, kriteria, mekanisme koordinasi dan indikator-indikator yang lebih terukur. Untuk itu, dukungan dari kalangan Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pengembangan Minapolitan dapat secara terus menerus di monitor, dievaluasi dan disempurnakan dalam rangka pencapaian sasaran-sasarannya.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, maka pola pendekatan program Minapolitan wajib dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk “gerakan aksi” (bukan proyek), sebagai strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah pada keterlibatan masyarakat untuk diajak berdialog dalam memutuskan kebutuhan-kebutuhannya, skala prioritasnya, dan bagaimana cara pencapaiannya - “*No empowerment without participation*” - Dengan demikian akan terlaksana pemberdayaan rakyat sebagai subyek (bukan obyek), yang diharapkan dapat mengantarkan keberhasilan dalam keberlanjutan program dengan orientasi jangka menengah dan panjang.

Disamping itu, karena operasionalisasi program Minapolitan tidak memiliki mata anggaran khusus pada departemen sektoralnya, maka diperlukan pembagian peran pusat dan daerah serta mekanisme pendanaannya. Dengan demikian di tingkat pusat perlu peningkatan koordinasi antar Kementerian dan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Pokja Agropolitan Tingkat Pusat.

Dewasa ini, Program Minapolitan telah banyak dilirik oleh pemerintah daerah sebagai salah satu strategi utama dalam pembangunan perdesaan, khususnya wilayah pesisir yang difasilitasi pemerintah pusat sebagai konsep pembangunan perikanan dan perdesaan, untuk: (a) Menciptakan keberimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan melalui penumbuhan pusat-pusat pelayanan agribisnis dalam pengertian yang luas dan pemukiman atau kota kecil; dan (b) Mengembangkan seluruh subsistem pembangunan perikanan yang terdiri dari: subsistem hulu, subsistem hilir dan subsistem penunjang sehingga sektor perikanan tumbuh mantap secara optimal dan bersaing. Namun demikian perlu disadari bahwa yang menjadi tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah perubahan pola pikir dan perilaku, yang sekaligus menjadi inti keberhasilan pembangunan sebagai investasi sosial. Tantangan pencapaiannya adalah proses yang membutuhkan konsistensi, dedikasi dan komitmen yang kuat pada tujuan pembangunan nasional.

2.4 Hubungan Industri Perikanan Dengan Pengembangan Wilayah Pesisir

Pembangunan wilayah pesisir selama ini masih dilihat seperti pembangunan wilayah terestrial lainnya dengan kondisi yang analogi dengan wilayah perdesaan. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena wilayah pesisir menurut RUU Pesisir memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu :

1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan

dinamis dari proses pelapukan (weathering) dan pembangunan ketiga aspek di atas;

2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari makan;
3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut;
4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan;
5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional.

Ketertinggalan pembangunan wilayah pesisir dan laut sebagai sumber daya ekonomi, merupakan indikator bahwa sektor kelautan selama 35 tahun belum menjadi sektor prioritas dalam pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Begitu sumberdaya alam lainnya (seperti hutan dan minyak bumi) sudah mengarah pada beban pembangunan karena sulit diperbaharui (un-renewable) sebagai akibat pengelolaan yang kurang bijaksana, maka sumberdaya pesisir dan laut merupakan pilihan berikutnya karena keberlimpahan sumberdaya yang ada serta belum dikelola secara optimal dan profesional.

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama, maka dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir harus memperhatikan tiga hal utama, yaitu :

1. Apapun persepsi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, maka sebagai sumber ekonomi baru yang kompetitif haruslah bermuara pada pengurangan kemiskinan masyarakat.
2. Fokus kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumber ekonomi baru harus berangkat pada pemikiran untuk meningkatkan pembangunan kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal yang ada.
3. Sedini mungkin membuat rambu-rambu pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan melibatkan masyarakat.

Dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan dalam era globalisasi, maka pembangunan perikanan serta pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut harus mampu mentransformasikan berbagai usaha perikanan masyarakat ke arah bisnis dan swasembada secara menyeluruh dan terpadu. Pendekatan menyeluruh (holistik) dan terpadu ini berarti melihat usaha perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, yaitu :

1. Sumberdaya perikanan, yaitu sumberdaya alam (baik yang berada di laut, pesisir, perairan tawar), SDM, dan sumberdaya buatan.
2. Sarana dan Prasarana, meliputi perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, pabrik es, cold storage, infrastruktur pada sentra industri, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (seperti BBM, benih, mesin dan alat tangkap), serta sistem informasi tentang teknologi baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien.
3. Produksi perikanan, meliputi usaha budidaya dan penangkapan yang menyangkut usaha perikanan skala kecil maupun besar.
4. Pengolahan Hasil perikanan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen sampai produk siap dipasarkan.
5. Pemasaran hasil perikanan, meliputi kegiatan distribusi dan pemasaran hasil-hasil perikanan atau olahannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk pula di dalamnya kegiatan pemantauan distribusi informasi pasar (market development) dan pengembangan produk (product development).
6. Pembinaan, mencakup kegiatan pembinaan institusi, iklim usaha yang kondusif, iklim poleksosbud yang mendukung, peraturan dan perundangan yang kondusif, pembinaan SDM, serta kepemimpinan yang baik agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai seefektif mungkin.

Salah satu pelaku penting dalam klaster nelayan pesisir adalah industri pengolahan ikan. Dengan kondisi nelayan sebagai salah satu pelaku yang cukup berperan dalam industri pengolahan ikan, maka perlu kiranya intervensi pemerintah yang menyentuh kepada kepentingan mereka pula. Untuk mengangkat keberdayaan

perekonomian masyarakat nelayan pesisir, perlu kiranya intervensi pemerintah melalui kebijakan ekonomi yang berpihak. Selama ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah belumlah menyentuh kepada kepentingan mereka.

2.5 Kriteria Pengembangan Industri Perikanan Menurut Akhmad Fauzi

2.5.1 Terdapatnya Potensi Perikanan Laut

Potensi perikanan laut Indonesia yang tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut teritorial, perairan laut nusantara dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508, memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton pertahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEEI.

Berdasarkan luasnya, laut yang dimiliki Indonesia tidak diragukan mengandung bermacam jenis ikan laut, baik yang komersial maupun yang tidak. Diantara Negara-negara produksi ikan di dunia dapat dinyatakan bahwa Indonesia masih masuk dalam peringkat besar produksi ikan.

2.5.2 Ketersediaan Bahan Baku

Industri perikanan membutuhkan bahan baku perikanan sebagai bahan baku utama. Oleh karena itu faktor ketersediaan bahan baku merupakan salah satu pendorong bagi perkembangan industri perikanan.

Lokasi industri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku dalam jumlah tersebut akan mempunyai perkembangan yang lebih lamban dibandingkan dengan lokasi yang dapat memenuhi jumlah tersebut. Namun demikian, kebutuhan bahan baku dapat dicukupi oleh lokasi lain yang terdekat tetapi akan mempunyai konsekuensi terhadap ongkos angkut bahan baku sehingga akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh.

2.5.3 Ketersediaan Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja ini sangatlah penting bagi kegiatan suatu industri, karena ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang pokok di dalam proses kegiatan industri perikanan serta kesempatan mengembangkan kegiatan industri perikanan.

Jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan berbeda untuk setiap industri. Untuk lokasi industri perikanan yang terletak di pedesaan tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan formal tinggi, hal tersebut dikarenakan sebagian pekerjaan yang harus dikerjakan merupakan pekerjaan kasar seperti : tukang angkut bahan baku, pencuci/pemotong, supir dan sebagainya.

2.5.4 Ketersediaan Air

Ketersediaan air merupakan hal pokok di dalam proses kegiatan industri. Sumber air yang dapat memenuhi kualitas air yang digunakan di dalam proses industri pengolahan hasil perikanan adapun air yang digunakan di dalam proses kegiatan industri perikanan yakni dengan menggunakan air tanah dan air dari PDAM.

2.5.5 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana

Perkembangan suatu wilayah pada dasarnya sangat ditentukan ketersediaan infrastruktur pendukungnya. Sarana prasarana pendukung dirasakan sangat penting dalam rangka peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi, diantaranya adalah transportasi dan perdagangan. Begitu pula dengan pengembangan industri perikanan yang memerlukan sarana dan prasarana yang baik pula dalam menunjang kegiatan yang ada.

2.5.6 Produktivitas Perikanan

Produktivitas perikanan dalam hal ini untuk pengadaan bahan baku industri perikanan itu sendiri, ini diperlukan secara terus menerus, dengan demikian diperlukan kontrol terhadap TPI (tempat pelelangan ikan) yang terdekat.

2.6 Metode Analisis

2.6.1 Metode Angka Indeks

Faktor-faktor penilai tingkat perkembangan masih berbentuk satuan-satuan yang tidak sejenis, sehingga akan sulit membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Untuk dapat membandingkannya perlu disusun angka indeks dari masing-masing faktor penilai tingkat perkembangan. Angka indeks adalah angka yang menyatakan besaran relatif dari suatu angka terhadap angka-angka lain yang mempunyai satuan yang sama.

Untuk menghitung angka indeks digunakan rumus :

$$\text{Angka Indeks} = \frac{\text{Potensi di Lokasi}}{\text{Potensi Terbesar}}$$

Sumber : Fahrizal Darminto, 1989 : 68

2.6.2 Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strengths, dan weakness, serta lingkungan eksternal opportunities dan threats yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) (*Freddy Rangkuti, 1997 : 18*).

Analisis SWOT adalah analisis yang mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Metode ini digunakan untuk mengetahui potensi, masalah, kendala dan peluang dari perkembangan industri perikanan, sarana dan prasarana, pemasaran, yang mendukung kegiatan industri perikanan. Untuk menggunakan analisis SWOT ini diperlukan penelitian secara langsung di lapangan dengan berbagai macam pertimbangan, baik secara teknis maupun non teknis. Analisis SWOT merupakan suatu alat efektif dalam membantu strukturalisasi suatu masalah, terutama dengan menggunakan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan eksternal.

Model-model yang digunakan dalam analisis SWOT antara lain adalah sebagai berikut :

- A. EFAS-IFAS (Faktor-faktor strategis internal dan eksternal)
- B. *Matriks Space*
- C. Matrik SWOT

Dengan menggunakan beberapa analisis akan lebih lengkap dan akurat sehingga menghasilkan rumusan strategi yang dapat menyelesaikan permasalahan dan strategi yang terbentuk sesuai dengan tujuan dan lingkungan yang dihadapi.

A. Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal (IFAS-EFAS)

Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis. Menganalisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan dan kelemahan. Masalah strategi yang akan di monitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin dapat mempengaruhi kegiatan industri perikanan di masa yang akan datang. Menganalisis lingkungan eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. Masalah strategis yang akan di monitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin dapat mempengaruhi kegiatan industri perikanan di masa yang akan datang.

Penggunaan metode-metode kuantitatif sangat dianjurkan untuk membuat peramalan (forcasting) dan asumsi-asumsi secara internal. Adapun langkah-langkah penyusunannya dapat dilihat pada sub-sub bab berikut ini :

a. Langkah Penyusunan Tabel IFAS

- Masukkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pada Tabel IFAS kolom 1. Susun 5 sampai dengan 10 faktor dari kekuatan, kelemahan (*Freddy Rangkuti, 2001 : 22*).
- Berikan bobot masing-masing faktor strategis pada kolom-kolom, dengan skala 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi dari skor total = 1,00. Faktor-faktor itu diberi bobot didasarkan pengaruh posisi strategi.
- Berikan rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan skala mulai dari 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah) berdasarkan pengaruh

faktor tersebut terhadap kondisi industri perikanan bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai 1 sampai dengan 4 dengan membandingkan terhadap rata-rata pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya jika kelemahan besar sekali (dibandingkan dengan rata-rata pesaing sejenis) nilainya adalah 1. Sedangkan jika nilai kelemahan rendah atau di bawah rata-rata pesaing-pesaingnya nilainya 4.

- Kaliikan bobot dengan nilai (rating) untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 0,4 (menonjol) sampai dengan 0,1 (lemah).
- Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi industri perikanan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana kegiatan industri perikanan bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan kegiatan industri perikanan dengan kegiatan lainnya. Tabel model analisis faktor strategi internal (IFAS) dapat dilihat pada **Tabel II.2**.

Tabel II.2
Model Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS)

| No | Faktor-faktor Strategis | Bobot | Nilai | Bobot x Nilai |
|----|---|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Kekuatan : (Faktor-faktor Yang Menjadi Kekuatan) | (Proportional Judgment) | (Proportional Judgment) | (Jumlah Perkalian Dengan Nilai Pada Setiap Faktor Dari Kekuatan) |
| | Jumlah | Jumlah Bobot Kekuatan | Jumlah Nilai Kekuatan | Jumlah Bobot x Nilai Kekuatan |
| 2. | Kelemahan : (Faktor-faktor Yang Menjadi Kelemahan) | (Proportional Judgment) | (Proportional Judgment) | (Jumlah Perkalian Dengan Nilai Pada Setiap Faktor Dari Kelemahan) |
| | Jumlah | Jumlah Bobot Kelemahan | Jumlah Nilai Kelemahan | Jumlah Bobot x Nilai Kelemahan |

Sumber : Freddy Rangkuti, 2001

b. Langkah Penyusunan Tabel EFAS

- Masukkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pada tabel EFAS kolom 1. Susun 5 sampai 10 faktor dari kekuatan, kelemahan (*Freddy Rangkuti, 2001*).
- Berikan bobot masing-masing faktor strategis pada kolom-kolom, dengan skala 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi dari skor total = 1,0. Faktor-faktor itu diberi bobot berdasarkan pengaruh posisi strategi (*Freddy Rangkuti, 2001*).
- Berikan rating pada kolom tiga untuk masing-masing faktor dengan skala mulai dari 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi kegiatan industri perikanan bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai dari 1 sampai dengan 4 dengan membandingkan rata-rata pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya, jika kelemahan besar sekali (dibandingkan dengan rata-rata pesaing sejenis) nilainya adalah 1. Sedangkan jika nilai kelemahan rendah atau dibawah rata-rata pesaing-pesaingnya nilainya 4.
- Kalikan bobot dengan nilai (rating) untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 0,4 (menonjol) sampai dengan 0,1 (lemah).
- Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi industri perikanan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana kegiatan industri perikanan bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan kegiatan industri perikanan dengan kegiatan lainnya. Tabel model analisis faktor strategi Eksternal (EFAS) dapat dilihat pada **Tabel II.3**.

Tabel II.3
Model Analisis Faktor Strategis Eksternal (EFAS)

| No | Faktor-faktor Strategis | Bobot | Nilai | Bobot x Nilai |
|----|---|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Peluang : (Faktor-faktor Yang Menjadi Peluang) | (Proportional Judgment) | (Proportional Judgment) | (Jumlah Perkalian Dengan Nilai Pada Setiap Faktor Dari Peluang) |
| | Jumlah | Jumlah Bobot Peluang | Jumlah Nilai Peluang | Jumlah Bobot x Nilai Peluang |
| 2. | Ancaman : (Faktor-faktor Yang Menjadi Ancaman) | (Proportional Judgment) | (Proportional Judgment) | (Jumlah Perkalian Dengan Nilai Pada Setiap Faktor Dari Ancaman) |
| | Jumlah | Jumlah Bobot Ancaman | Jumlah Nilai Ancaman | Jumlah Bobot x Nilai Ancaman |

Sumber : Freddy Rangkuti, 2001

c. Pembobotan (Scoring) dan Penilaian Rating

Pembobotan pada lingkungan internal tingkat kepentingannya didasarkan pada besarnya pengaruh faktor strategis terhadap posisi strategisnya, sedangkan pada lingkungan eksternal didasarkan pada kemungkinan memberikan dampak terhadap faktor strategisnya (Freddy Rangkuti, 22-24).

Jumlah bobot pada masing-masing lingkungan internal dan eksternal harus berjumlah = 1 (satu) :

Skor Total Internal \rightarrow Total Bobot Kekuatan + Total Bobot Kelemahan = 1.

Skor Total Eksternal \rightarrow Total Bobot Peluang + Total Bobot Ancaman = 1.

d. Penilaian (Rating)

Nilai rating berdasarkan besarnya pengaruh faktor strategis terhadap kondisi dirinya (Freddy Rangkuti, 22-24) dengan ketentuan sebagai berikut :

Skala mulai dari 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah)

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| Sangat Kuat | : | Kuat | : | Rata-rata | : | Lemah |
| | | | | | | |
| 4 | : | 3 | : | 2 | : | 1 |

Variabel yang bersifat positif (variabel kekuatan dan peluang) diberi nilai dari 1 sampai 4 dengan membandingkan dengan rata-rata pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya jika kelemahan atau ancaman besar sekali (disbanding dengan rata-rata pesaing sejenisnya) nilainya adalah 1, sedangkan jika nilai ancaman kecil atau dibawah pesaingnya nilainya 4 (empat).

B. Analisis *Matrik Space*

Matrik Space adalah suatu dasar untuk mengetahui posisi kegiatan industri perikanan. Yang didapat dari nilai rating yang dimiliki oleh faktor-faktor strategisnya. Matrik Space digunakan untuk melihat garis vektor positif dan negatif untuk internal dan eksternal.

Garis vektor internal sebagai garis horizontal dan garis vektor eksternal sebagai garis vertikal dalam diagram posisi perkembangan kegiatan industri perikanan model yang digunakan sebagai matrik space dapat dilihat pada **Tabel II.4**.

Tabel II.4
Model Analisis *Matriks Space*

| No | Faktor-faktor Strategis Internal | Rating | Faktor-faktor Strategis Eksternal | Rating |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Kekuatan : (Faktor-faktor Yang Menjadi Kekuatan) | (Rating Dari Tabel IFAS Dengan Nilai Positif) | Peluang : (Faktor-faktor Yang Menjadi Peluang) | (Rating Dari Tabel EFAS Dengan Nilai Positif) |
| | Jumlah | Jumlah Rating Positif | Jumlah | Jumlah Rating Positif |
| 2. | Kelemahan : (Faktor-faktor Yang Menjadi Kelemahan) | (Rating Dari Tabel IFAS Dengan Nilai Negatif) | Ancaman : (Faktor-faktor Yang Menjadi Ancaman) | (Rating Dari Tabel EFAS Dengan Nilai Negatif) |
| | Jumlah | Jumlah Rating Negatif | Jumlah | Jumlah Rating Negatif |

Sumber : Freddy Rangkuti, 2001

C. Analisis Matrik SWOT

Matrik SWOT adalah yang mengintegrasikan faktor strategis internal dan eksternal. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman (eksternal) yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimiliki (*Freddy Rangkuti, 2001 : 31*). Strategi SO adalah strategi yang digunakan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Sedangkan strategi WO adalah strategi yang digunakan seoptimal mungkin untuk meminimalisir kelemahan. Strategi ST adalah strategi yang digunakan dengan memanfaatkan/mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman. Strategi WT adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir/menghindari ancaman. Model analisis SWOT dapat dilihat pada **Tabel II.5**.

Tabel II.5
Model Matrik Analisis SWOT

| IFAS EFAS | Kekuatan (S) | Kelemahan (W) |
|----------------|---|---|
| Peluang (O) | Strategi SO (Strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang) | Strategi WO (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang) |
| Ancaman (T) | Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman) | Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman) |

Sumber : Freddy Rangkuti, 2001

1. Alternatif Strategi

Alternatif strategi adalah hasil matrik analisis SWOT yang menghasilkan berupa strategi SO, WO, ST, SW. Alternatif strategi yang dihasilkan minimal 4 buah strategi sebagai hasil dari analisis matrik SWOT. Menurut (*Freddy Rangkuti, 2001 : 31 - 32*) strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

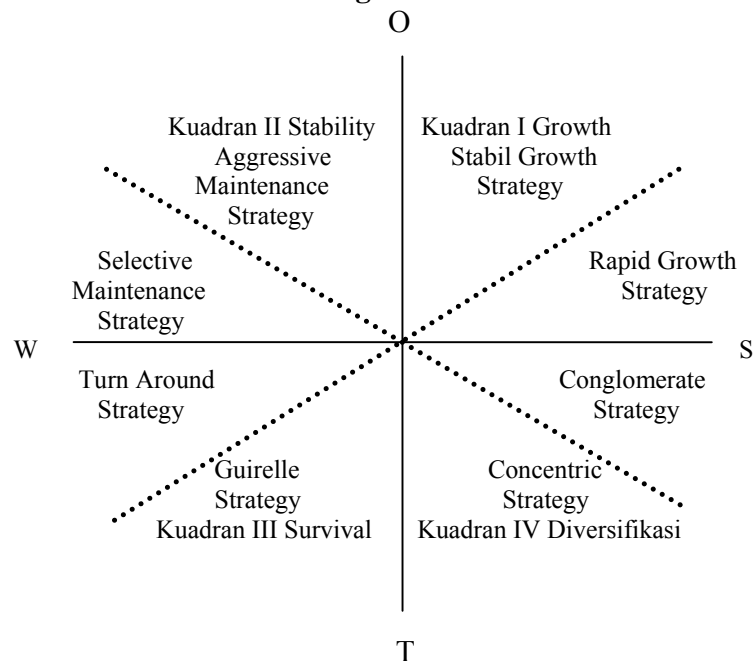
d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan usaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

2. Pemetaan Posisi Industri Perikanan Laut

Pemetaan posisi industri perikanan bertujuan untuk mengetahui posisi industri perikanan dari suatu obyek industri perikanan dalam kondisi perkembangannya saat ini. Pemetaan didasarkan pada analogi sifat yang dimiliki dari faktor-faktor strategis. Kekuatan memiliki sifat positif, kelemahan bersifat positif dan ancaman bersifat negatif (lihat rating, Matrik Space). Diagram posisi perkembangan industri perikanan memberikan gambaran keadaan perkembangan industri perikanan berdasarkan kuadran-kuadran yang dihasilkan garis vektor SW dan garis-garis vektor OT, setiap kuadran memiliki rumusan strategis sebagai strategi utamanya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya garis vektor pada diagram posisi perkembangan industri perikanan didasarkan pada logika faktor strategis internal membentuk garis horizontal dan faktor strategis eksternal membentuk garis vertikal. Posisi perkembangan industri perikanan dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.

Gambar 2.3
Model Posisi Perkembangan Lokasi Industri Perikanan



Sumber : LM-FELI I (H.Oka A. Yoeti, 1996)

Rumusan kuadran yang secara khusus untuk industri perikanan dan beberapa pengertian yang melalui proses adaptasi dan penggunaan analisis SWOT untuk perusahaan, sehingga diadaptasi suatu rumusan sebagai berikut :

1. Kuadran I : Growth (Pertumbuhan)

Strategi pertumbuhan didesain untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, asset, profit atau kombinasi ketiganya.

2. Kuadran II : Stability (Stabilitas)

Strategi stabilitas adalah strategi konsolidasi untuk mengurangi kelemahan yang ada, dan mempertahankan pangsa pasar yang sudah dicapai (*Oka A. Yoeti, 1996 : 144*). Stabilitas diarahkan untuk mempertahankan suatu keadaan dengan berupaya memanfaatkan peluang dan memperbaiki kelemahan. Strategi stabilitas terbagi dua yaitu :

- a. Aggressive Maintenance Strategy (Strategi Perbaikan Agresif), adalah strategi konsolidasi internal dengan mengadakan perbaikan-perbaikan

- berbagai bidang. Perbaikan faktor-faktor kelemahan untuk memaksimalkan pemanfaatan peluang.
- b. Selective Maintenance Strategy (Strategi Perbaikan Pilihan), adalah strategi konsolidasi internal dengan melakukan perbaikan pada suatu yang menjadi kelemahan. Memaksimalkan perbaikan faktor-faktor kelemahan untuk memanfaatkan untuk memanfaatkan peluang.
3. Kuadran III : Survival (Bertahan)
 - a. Turn Around Strategy (Strategi Memutar Balik), adalah strategi yang membalikkan kecenderungan-kecenderungan negatif sekarang, yang paling umum tertuju pada pengelolaan.
 - b. Guirelle Strategy (Strategi Merubah Fungsi), adalah strategi merubah fungsi yang diselidiki dengan fungsi lain yang benar-benar berbeda.
 4. Kuadran IV : Diversifikasi

Strategi penganekaragaman dibagi dua, yaitu :

 - a. Diversifikasi Concentric Strategy (Strategi Diversifikasi Konsentrik), adalah diversifikasi meminimalisir ancaman.
 - b. Diversifikasi Conglomerate Strategy (Strategi Diversifikasi Konglomerat), adalah memasukkan investor untuk mendanai diversifikasi yang mempertimbangkan laba.

2.7 Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah

2.7.1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dalam UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, pada Bab I pasal 1 menjelaskan antara lain mengenai :

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara pemerintah dan Pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangroove dan biota laut lain; sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam. Permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuary, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang di tetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
5. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah uapaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
6. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Sedangkan pada Bab II ini, dijelaskan juga tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbunyi :

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan :

- Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumberdaya Pesisir dan sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

- Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Memperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam mendorong pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan;
- Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Implikasi dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir terhadap perikanan adalah :

- Kepentingan pusat dan daerah merupakan keterpaduan dalam bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti pertahanan negara, wilayah perbatasan negara, kawasan konservasi, alur pelayaran internasional, Kawasan migrasi ikan dan kawasan perjanjian internasional di bidang kelautan dan perikanan.
- Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan.
- Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.
- Penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi.

2.7.2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa sumberdaya alam yang berada di pesisir Indonesia masuk dalam zona eksklusif pembangunan ekonomi di Negara Indonesia yang memang merupakan Negara kepulauan ini, adapun penjelasan mengenai hal tersebut diatas dapat dilihat pada Bab I yang berbunyi :

- Sumberdaya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Sumberdaya alam non-hayati adalah unsur alam bukan sumberdaya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Konservasi sumberdaya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Selain itu pada beberapa bab lainnya yang terkandung di dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai beberapa hal penting lainnya yang antara lain mencakup :

“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin”.

2.7.3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, pada Bab I pasal 1 menjelaskan antara lain mengenai :

- Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
- Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
- Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan,

pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelat ikan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

2.7.4 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dalam rangka pembangunan perikanan nasional, sumberdaya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara langsung dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung sumberdaya perikanan di seluruh perairan Indonesia, sehingga mengingat artinya yang sangat penting tersebut, maka pemanfaatan sumberdaya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perlu diatur secara tepat, terarah, dan bijaksana.

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan Negara pantai yang bersangkutan tersebut, maka pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari pada sumberdaya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus diarahkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia. Sehingga, untuk mempercepat peningkatan kemampuan usaha perikanan Indonesia tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dipandang perlu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada Bab I dan Bab II dari Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 dijelaskan mengenai :

- Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah banyaknya sumber daya alam hayati yang boleh ditangkap dengan memperhatikan pengamanan konservasinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Orang atau badan hukum asing dapat diberi kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sepanjang orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Sedangkan pada Bab III dari Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 dijelaskan mengenai :

- Menteri Pertanian menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya alam hayati di sebagian atau seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Untuk pelestarian sumber daya alam hayati, dilarang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan bahan atau alat lainnya yang berbahaya.

Dengan adanya peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumberdaya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini, diharapkan dapat membentuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang terarah dan terpadu dengan baik serta dapat mengendalikan penggunaan sumberdaya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya, dan diharapkan juga dengan adanya peraturan pemerintah ini dapat melindungi dan melestarikan segala sumberdaya alam yang terkandung di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini.

2.8 Kajian Studi Terdahulu

2.8.1 Studi Arahan Pengembangan Agribisnis Dalam Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta (Riza Syarliandi Syahputra, Tugas Akhir, Universitas Islam Bandung, 2008)

Tujuan dari studi ini adalah mengarahkan pengembangan agribisnis dalam sektor pertanian hortikultura di Kecamatan Wanayasa sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang.

Analisis yang dilakukan dalam studi ini analisis superimpose yang akan menghasilkan Satuan Penggunaan Lahan (SPL), kriteria FAO dan keppres No. 32 tahun 1990, kesesuaian lahan menurut RTRW untuk menentukan kawasan yang telah terbentuk dalam wilayah agribisnis tersebut sehingga terjadi klasifikasi agribisnis dalam produksi pertanian dan perkebunan rakyat. Sedangkan untuk perhitungannya menggunakan metoda LQ dan shift-share yang dilakukan dalam penentuan komoditas unggulan berdasarkan tingkat produksi dan harga pasar yang berlaku. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat komoditas yang akan diolah dan mempunyai

orientasi pasar. Sehingga pengeluaran akhir dari studi ini yaitu diketahui suatu arahan dalam pengembangan agribisnis disektor pertanian hortikultura di Kecamatan Wanayasa.

2.8.2 Studi Arahan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumberdaya Pesisir Dan Daratan Di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Baiq Rika Sartika Dewi, Tugas Akhir, Universitas Islam Bandung, 2003)

Tujuan dari studi ini adalah bagaimana memanfaatkan dan mengolah potensi sumberdaya alam di Kecamatan Jerowaru berdasarkan karakteristik yang dimiliki secara optimal yang mencakup sumberdaya pesisir dan sumberdaya daratan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan melalui penentuan zona wilayah pesisir dan daratan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi kegiatan yang akan dikembangkan, perumusan struktur tata ruang optimal yang mempertimbangkan aspek kualitas dan distribusi pusat-pusat pelayanan serta keterkaitan antar pusat-pusat yang dimaksud. Peningkatan fungsi dan kondisi faktor-faktor pendukung kegiatan utama pada wilayah pesisir dan daratan.

Analisis yang dilakukan untuk mendukung tujuan studi antara lain yaitu analisis kondisi dan karakteristik sumberdaya pesisir dan daratan, analisis zonasi dan pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan, analisis kesesuaian lahan dan peruntukkan lahan di wilayah daratan, analisis proyeksi penduduk dan perbandingan terhadap lahan, analisis Location Quotient dan analisis Shift-Share untuk mengetahui lokasi pengembangan berbagai komoditas pada beberapa sektor perekonomian, analisis Macro-Micro Screening untuk mengetahui perkembangan berbagai komoditas di lapangan, analisis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang serta analisis struktur ruang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah disebutkan diatas dengan berbagai metode maka dapat diketahui bahwa masing-masing zona yang telah terbagi memiliki fungsi kegiatan yang ada dan potensial untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pembangunan fungsi-fungsi kegiatan zona wilayah adalah pada aspek sarana dan prasarana.

2.8.3 Studi Arah Pengembangan Lahan Kawasan Pantai Di Kabupaten Cirebon (Erwin Gumilar, Tugas Akhir, Universitas Islam Bandung, 2002)

Tujuan dari studi ini adalah memberikan arahan pengembangan lahan wilayah pesisir, agar terciptanya pemanfaatan yang optimal bagi aspek-aspek kepentingan sosial budaya, ekonomi, serta kelestarian dari ekosistem wilayah pesisir itu sendiri. Adapun tujuan studi ini adalah memberikan batasan-batasan pada pemanfaatan wilayah pesisir yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik ekosistemnya.

Analisis yang dilakukan dalam studi ini menggunakan analisis kawasan lindung dan budidaya mengacu pada Keppres No. 32 tahun 1990, analisis kesesuaian lahan untuk kegiatan yang sifatnya budidaya maupun non-budidaya, analisis ekonomi Location Quotient dan Shift-Share untuk menentukan jenis komoditi unggulan, sedangkan analisis terhadap wilayah pesisir dilakukan untuk memperoleh karakteristik dari ekosistem wilayah pesisir tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan arahan pengembangan lahan di wilayah pesisir, baik untuk lahan wilayah pesisir itu sendiri maupun lahan-lahan di atasnya, sebagai satu kesatuan pandangan dalam pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Sebagai hasil akhir dalam studi ini adalah berupa rumusan mengenai prinsip pengelolaan wilayah pesisir, konsep dasar pengembangan, pedoman pengelolaan serta arahan pengembangan lahan wilayah pesisir baik fungsi ruang maupun distribusi kegiatan yang dianggap paling sesuai untuk wilayah pesisir di wilayah studi tersebut.

2.8.4 Studi Arah Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Garut (Andry Andreas. N, Tugas Akhir, Institut Teknologi Bandung, 2006)

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah pembangunan sepenuhnya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mencapai kebutuhan dasar. Dengan sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan ini adalah peningkatan efisiensi seluruh faktor produksi di wilayah yang kurang berkembang secara integritas.

Dalam studi ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menentukan tingkatan pusat-pusat pelayanan, penentuan sistem perwilayahan dan arahan

pengembangan pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir Kabupaten Garut. Metoda analisis yang digunakan bagi pendekatan makro adalah dengan menggunakan Skala Guttman dan Indeks Sentralitas. Konsep tersebut merupakan konsep pengembangan yang mengintegrasikan seluruh sumberdaya dengan kekuatan-kekuatan lokal sehingga mampu mencapai keseimbangan pemerataan pelayanan di wilayah pesisir Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kedua pendekatan tersebut yaitu diketahui bahwa diperlukan penstrukturan kembali sistem perwilayahan melalui pembentukan hierarki pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir Kabupaten Garut.

2.8.5 Studi Arah Pengembangan Pariwisata Biak Numfor Berdasarkan Analisis Potensi Wilayah (Yemmy Mamoribo, Tugas Akhir, Institut Teknologi Bandung, 2002)

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan arahan bagi pengembangan sektor pariwisata pesisir di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan analisis potensi-potensi tersebut adalah sisi supply yang ada maupun yang berpeluang untuk dikembangkan. Dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu menentukan batas kawasan wisata, identifikasi potensi wisata pada setiap kawasan wisata di wilayah pesisir, menentukan prioritas pengembangan wisata dan merumuskan arahan pengembangan pariwisata Biak Numfor yang bersifat umum dan khusus.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mencakup metode/teknik skalogram. Adapun hasil dari analisis dengan menggunakan teknik skalogram ini terhadap beberapa faktor pembentuk potensi wisata pada setiap kawasan wisata prioritas, dimana kawasan nantinya dihasilkan suatu kawasan dengan prioritas tertinggi dan prioritas terendah.

Dari perbandingan kajian studi terdahulu diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari studi-studi tersebut adalah sama yaitu untuk memberikan arahan pengembangan yang dianggap sesuai bila diterapkan di wilayah tersebut. Adapun semua arahan pengembangan dan pengelolaan dari berbagai potensi sumberdaya alam yang potensial ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Adapun analisis yang digunakan di dalam kelima studi ini hampir sama, hanya ada beberapa metode analisis yang berbeda, dimana analisis tersebut digunakan sesuai dengan maksud atau tujuan awal dari setiap penelitian tersebut. Sehingga dari setiap metode analisis ini nantinya menghasilkan suatu temuan baru terhadap wilayah pesisir yang telah dikaji oleh penulis diatas.

Tabel II.6
Perbandingan Kajian Studi Terdahulu

| Penulis | Riza Syarliandi Syahputra | Baik Rika Sartika Dewi | Erwin Gumilar | Andry Andreas. N | Yemmy Mamoribo |
|----------------|--|--|---|--|--|
| Judul | Arahan Pengembangan Agribisnis Dalam Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta | Arahan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumberdaya Pesisir Dan Daratan Di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur | Arahan Pengembangan Lahan Kawasan Pantai Di Kabupaten Cirebon | Arahan Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Garut | Arahan Pengembangan Pariwisata Biak Numfor Berdasarkan Analisis Potensi Wilayah |
| Tujuan | Tujuan dari studi ini adalah mengarahkan pengembangan agribisnis dalam sektor pertanian hortikultura di Kecamatan Wanayasa sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang. | Perumusan arahan pengelolaan potensi sumberdaya wilayah pesisir di Kecamatan Jerowaru berdasarkan karakteristik yang dimiliki secara optimal yang mencakup sumberdaya pesisir dan sumberdaya daratan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan | memberikan batasan-batasan pada pemanfaatan wilayah pesisir yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik ekosistemnya | Pembangunan sepenuhnya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mencapai kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat | memberikan arahan bagi pengembangan sektor pariwisata pesisir di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan analisis potensi-potensi yang berpeluang untuk dikembangkan |

Lanjutan Tabel II.6

| Penulis | Riza Syarliandi Syahputra | Baik Rika Sartika Dewi | Erwin Gumilar | Andry Andreas. N | Yemmy Mamoribo |
|----------------|--|--|--|---|--|
| | | masyarakat yang berkelanjutan | | | |
| Sasaran | Mengetahui komoditas unggulan dalam produksi pertanian hortikultura, mengetahui komoditas yang akan diolah dalam produksi pertanian hortikultura, mengidentifikasi keberadaan sistem sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan pertanian hortikultura dan merumuskan arahan agribisnis dalam sektor pertanian hortikultura di wilayah | Identifikasi karakteristik wilayah studi yaitu pesisir dan daratan Kecamatan Jerowaru dan identifikasi sumberdaya potensial yang ada serta sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh wilayah studi | Identifikasi karakteristik fisik kawasan dan pemanfaatan lahan kawasan di wilayah studi, dan identifikasi potensi wilayah pesisir berdasarkan yang ada di wilayah studi, serta identifikasi terhadap kendala-kendala yang terdapat di wilayah tersebut | Peningkatan efisiensi seluruh faktor produksi di wilayah yang kurang berkembang secara integritas | Menentukan batas kawasan wisata, identifikasi potensi wisata pada setiap kawasan wisata di wilayah pesisir, menentukan prioritas pengembangan kawasan wisata dan merumuskan arahan pengembangan pariwisata Biak Numfor yang bersifat umum dan khusus |

Lanjutan Tabel II.6

| Penulis | Riza Syarliandi Syahputra | Baik Rika Sartika Dewi | Erwin Gumilar | Andry Andreas. N | Yemmy Mamoribo |
|---------|--|--|---|---|--|
| | studi | | | | |
| Metode | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis superimpose ▪ Analisis ekonomi Location Quotient dan Shift-Share | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis kondisi dan karakteristik sumberdaya pesisir dan daratan ▪ Analisis zonasi dan pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan ▪ Analisis kesesuaian lahan dan peruntukkan lahan di wilayah daratan ▪ Analisis proyeksi penduduk dan perbandingan terhadap lahan ▪ Analisis Location Quotient dan analisis Shift-Share | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis kawasan lindung dan budidaya ▪ Analisis kesesuaian lahan untuk kegiatan yang sifatnya budidaya maupun non-budidaya ▪ Analisis ekonomi Location Quotient dan Shift-Share ▪ Analisis kebutuhan sarana dan prasarana ▪ Analisis penduduk regresi linear | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skala Guttman ▪ Indeks Sentralitas | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknik Skalogram |

Lanjutan Tabel II.6

| Penulis | Riza Syarliandi Syahputra | Baik Rika Sartika Dewi | Erwin Gumilar | Andry Andreas. N | Yemmy Mamoribo |
|---------|---|---|---|---|--|
| | | <p>dan Macro-Micro Screening</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis kebutuhan sarana prasarana penunjang serta analisis struktur tata ruang | | | |
| Hasil | Arahan dalam pengembangan agribisnis disektor pertanian holtikultura di Kecamatan Wanayasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Arahan pada pengelolaan dan pengembangan sumberdaya pesisir dan daratan yang berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Memberikan rumusan mengenai prinsip pengelolaan wilayah pesisir, konsep dasar pengembangan, pedoman pengelolaan serta arahan pengembangan lahan wilayah pesisir baik fungsi | Mengetahui bahwa diperlukannya penstrukturan kembali sistem perwilayahan melalui pembentukan hierarki pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir tersebut sehingga dapat mengarahkan pengembangan | Mengetahui beberapa faktor pembentukan potensi wisata pada setiap kawasan wisata prioritas |

Lanjutan Tabel II.6

| Penulis | Riza Syarliandi Syahputra | Baik Rika Sartika Dewi | Erwin Gumilar | Andry Andreas. N | Yemmy Mamoribo |
|---------|------------------------------|---------------------------|--|---|----------------|
| | | | ruang maupun distribusi kegiatan yang dianggap paling sesuai untuk wilayah pesisir di wilayah studi tersebut | pusat pelayanannya secara optimal | |

Sumber : Hasil Kajian Studi Terdahulu